

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang telah berjalan kurang lebih dari tiga belas tahun di Indonesia telah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu yang paling dominan dari aspek reformasi ini adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada aspek pemerintahan ini, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah secara proposional.

Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah

maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia (Bastari, 2004).

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian dalam Sande, 2013). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordawan dalam Sande, 2013), karena semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan tersebut.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana dalam Sande, 2013). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo dalam Sande, 2013). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Permasalahannya adalah, upaya reformasi penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual di jajaran pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah karena dianggap basis ini mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan. Dengan kata lain, dengan menggunakan basis akrual, informasi yang diperoleh dari basis-basis yang lain akan dapat juga disediakan. Namun dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone Bolango penerapan basis ini

belum sepenuhnya diterapkan. Karena, untuk menerapkan metode pencatatan *double entry* berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Pemerintah daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, umumnya pemerintah daerah memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi secara baik.

Dengan minimnya pengetahuan SDM dalam menguasai logika akuntansi secara baik maka berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini terkait dengan penyajian aset. Menurut BPK RI terkait dengan penyajian aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat aset tetap yang belum dapat diketahui kewajarannya sebesar Rp. 96.677.501.720,30 yang terdiri dari: Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp16.002.569.966,30; biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.252.037.626,00 dan pada Aset

Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.151.950.964,00; biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya. Dan juga, catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap periode bersangkutan (www.bpk.go.id).

Masalah lain adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) dengan judul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara". Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan

daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar, penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sande (2013) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **”Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Agar masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual yang disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM dalam menguasai logika akuntansi secara baik.

2. Belum maksimalnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan pengelolaan aset.
3. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui media masa ataupun media *online* nampaknya belum menjadi hal yang umum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.